

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Saat ini di Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang, dimana pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional harus dilaksanakan disegala sektor kehidupan bangsa. Sektor-sektor pembangunan tersebut antara lain sektor politik, sektor ekonomi, sektor budaya, sektor hukum, sektor ilmu pengetahuan dan teknologi serta sektor keamanan. Pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Program Keluarga Berencana, pengucuran dana Inpres pendidikan, kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi. (Asmara ,2010)

Ada berbagai program yang berskala nasional yang bertujuan untuk melakukan intervensi bagi penanggulangan masalah kemiskinan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Inpres Desa Tertinggal (IDT). Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM MANDIRI) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Pendekatan PNPM MANDIRI

merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Sasaran kegiatan SPP dalam program PNPM-MP ini adalah meliputi seluruh kecamatan dan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori bermasalah dalam PPK/ PNPM Mandiri perdesaan. Kelompok sasaran program ini adalah masyarakat miskin di perdesaan, kelembagaan masyarakat di perdesaan dan kelembagaan pemerintah lokal.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Program PNPM-MP di Provinsi Lampung telah dilakukan di hampir seluruh kabupaten di Provinsi Lampung sejak awal dilaksanakannya program ini pada tahun 2007 dan program ini masih terus berjalan hingga sekarang. Data jumlah kecamatan dan desa penerima BLM Provinsi Lampung pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Daftar jumlah kecamatan penerima BLM Provinsi Lampung 2010.

Kabupaten	Jumlah Kecamatan
Lampung Barat	17
Lampung Selatan	15
Lampung Tengah	17
Lampung Timur	13
Lampung Utara	8
Mesuji	3
Pesawaran	3
Pringsewu	4
Tanggamus	9
Tulang Bawang	7
Way Kanan	8
Tulang Bawang Barat	3
Total	107

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung, 2011

Tabel 1 menunjukkan jumlah kecamatan di Provinsi Lampung yang menerima BLM pada tahun 2010. Pada tabel di atas kabupaten Lampung Barat dan Lampung Tengah memiliki kecamatan penerima BLM PNPM-MP terbanyak. Sedangkan untuk Kabupaten Pringsewu menempati urutan ke 2 terkecil setelah Kabupaten Mesuji, Pesawaran, dan Tulang Bawang Barat.

Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten yang memiliki perkembangan cukup cepat dalam dunia usaha baik itu usaha yang dilakukan secara individu maupun usaha yang dilakukan secara berkelompok. Hal ini dapat terlihat dari berbagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pringsewu. Kegiatan usaha diantaranya berupa kegiatan usaha pertanian, perindustrian maupun kegiatan usaha perdagangan. Berdasarkan potensi yang ada tersebut kaum perempuan di Kabupaten Pringsewu turut andil dalam

dunia usaha. Peran serta kaum perempuan dalam dunia usaha sangatlah penting baik sebagai perencana, pelaksana maupun sebagai pemproduksi. Meskipun prospek usaha di Kabupaten Pringsewu cukup menjanjikan namun dalam pelaksanaan pengembangan usaha tidaklah semudah yang dibayangkan. Pengembangan usaha masih terganjal oleh berbagai kendala seperti kurangnya modal usaha. Untuk mengatasi permasalahan tersebut para kaum perempuan yang tergabung dalam kelompok usaha melakukan peminjaman modal usaha. Salah satunya yaitu melalui peminjaman dana bergulir SPP dalam program PNPM-MP. Data tentang kelompok SPP di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Daftar jumlah desa dan kelompok SPP PNPM-MP per kecamatan di Kabupaten Pringsewu.

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah kelompok
1	Gadingrejo	15	4
2	Pagelaran	24	3
3	Pardasuka	12	3
4	Sukoharjo	13	3
5	Adiluwih	8	-
6	Banyumas	8	-
7	Ambarawa	8	-
8	Pringsewu	7	-
Jumlah		95	13

Sumber : Fasilitator Kabupaten PNPM-MP Kabupaten Pringsewu

Tabel 2 menunjukkan daftar Jumlah desa dan jumlah kelompok SPP PNPM-MP per kecamatan yang menerima bantuan BLM PNPM-MP di Kabupaten Pringsewu. Pada data di atas jumlah desa penerima paling banyak adalah pada Kecamatan Pagelaran sebanyak 24 desa disusul dengan Kecamatan

Gadingrejo sebanyak 15 desa, Kecamatan Sukoharjo sebanyak 13 desa dan kecamatan Pardasuka 12 desa. Namun, untuk kegiatan SPP Kecamatan gadingrejo memiliki jumlah kelompok terbanyak yaitu sebanyak 4 kelompok. Untuk Desa Sukoharjo, Adiluwih, Banyu mas, dan Ambarawa tidak terdapat kelompok SPP mengingat dana yang tersedia sangatlah terbatas. Sedangkan untuk Pringsewu tidak terdapat kelompok SPP karena pringsewu termasuk dalam wilayah PNPM Perkotaan.

Kecamatan Gadingrejo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pringsewu dimana kaum perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia usaha baik berupa kelompok maupun individu yang diantaranya berupa usaha perdagangan. Kegiatan tersebut dilakukan guna membantu perekonomian keluarga supaya dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Kaum perempuan tersebut meminjam modal pada bank untuk mengembangkan usahanya tersebut baik sebagai modal awal maupun untuk memajukan usaha kecil mereka demi meningkatkan taraf ekonomi dan kehidupan yang lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu diberdayakan dalam memanfaatkan peluang kerja dan dalam menghadapi persaingan usaha dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

Pembagian alokasi dana BLM PNPM-MP di Kecamatan Gadingrejo diurutkan berdasarkan perankingan. Perankingan di maksudkan untuk menentukan desa yang menjadi mayoritas untuk mendapatkan dana tersebut berdasarkan kondisi desa serta pemilihan dari masing-masing perwakilan desa mengingat terbatasnya dana yang ada, sehingga tidak semua desa di

Kecamatan Gadingrejo mendapatkan alokasi Dana BLM PNPM-MP. Desa yang mendapatkan paling banyak suara akan menempati urutan paling atas. Sedangkan desa yang menempati urutan berikutnya mendapatkan alokasi dana setelah dikurangi dengan pengeluaran desa yang berada di atasnya. Urutan ini terus berlanjut hingga terdapat jumlah dana minimum untuk melakukan kegiatan. Data alokasi Dana BLM PNPM-MP Kecamatan Gadingrejo tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel.3 Daftar desa dan jumlah kegiatan yang menggunakan dana BLM PNPM-MP Kecamatan Gadingrejo 2011.

No	Ranking	Desa	Jumlah kegiatan
1	1	Tegalsari	4
2	2	Bulurejo	5
3	3	Wonosari	4
4	4	Tambahrejo	2
5	5	Parerejo	2
6	-	Gadingrejo	1
7	-	Mataram	1
Jumlah		7	19

Sumber : Fasilitator PNPM-MP Kecamatan Gadingrejo

Data pada tabel 3 merupakan data perankingan dan desa yang mendapatkan alokasi BLM PNPM-MP pada tahun 2011. Pada tabel di atas Desa Tegalsari menempati ranking tertatas dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 kegiatan yang disusul dengan Desa Bulurejo sebanyak 5 kegiatan, desa Wonosari sebanyak 4 kegiatan, Desa Tambahrejo dan Desa Parerejo sebanyak 2 kegiatan. Untuk Desa Gadingrejo dan Desa Mataram tidak termasuk ke dalam urutan ranking dan hanya melakukan pengelolaan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Alokasi dana BLM PNPM-MP tidak hanya diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga dipergunakan sebagai dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Alokasi dana BLM PNPM-MP untuk SPP ini diwajibkan untuk diadakan di setiap kecamatan dan tidak diperbolehkan seluruh alokasi dana dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana. SPP merupakan dana bergulir Dalam PNPM-Mandiri Pedesaan yang pada hakikatnya dipengaruhi oleh tiga hal yaitu: (1) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dan penyalur seluruh dana bergulir tingkat kecamatan, (2) kelompok peminjam sebagai pengelola dan penyalur dana bergulir kepada anggotanya sebagai pemanfaat langsung serta aturan dan , (3) prosedur atau mekanisme perguliran. Selain itu, forum Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai forum yang mempunyai wewenang untuk menetapkan beberapa keputusan mengenai perguliran seperti aturan dan prosedur perguliran harus difasilitasi dengan baik sehingga setiap keputusannya mendukung pelestarian dan pengembangan dana bergulir. Berikut data anggota kelompok SPP PNPM-MP per desa di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

Tabel 4. Jumlah anggota kelompok SPP Program PNPM-MP di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

No	Desa	Kelompok	Jumlah Anggota
1	Wonosari	1	10
2	Gadingrejo	2	20
3	Mataram	1	10
Jumlah		4	40

Sumber : UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Gadingrejo Tahun 2011

Tabel 3 menunjukkan jumlah anggota kelompok penerima SPP Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu tahun 2011 sebanyak 4 kelompok dimana masing-masing kelompok memiliki anggota sebanyak 10 orang sehingga diketahui jumlah total anggota sebanyak 40 orang.

Kelompok Perempuan pemanfaat Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP mempunyai peran yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok perempuan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan modal SPP untuk membuka usaha, mengelola usaha dengan cara dan strategi mereka masing-masing baik itu dalam usaha pertanian, perdagangan, maupun industri. Dalam kegiatan perdagangan para kaum perempuan tersebut melayani pembeli, berbelanja barang kebutuhan toko yang telah habis terjual dan mengelola keuntungan hasil usaha yang kemudian digunakan untuk membeli keperluan rumah tangga yang masih kurang. Jika masih ada keuntungan lebih para kaum perempuan menabung penghasilan tersebut untuk keperluan lain yang tidak terduga, serta menyimpannya untuk keperluan penyeteroran pengembalian modal SPP. Dengan keterlibatan istri di ranah publik, beban suami menjadi lebih ringan sehingga para suami pun memperkenankan istri untuk terlibat secara aktif membantu ekonomi keluarga, walaupun tetap mengingatkan istri mereka untuk tetap memperhatikan pemeliharaan rumah tangga.

Suku bunga yang lebih rendah daripada bank yaitu sebesar 1,5 persen per bulan, diharapkan kegiatan SPP PNPM-MP dapat membantu masyarakat terutama kaum perempuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup serta menunjang perekonomian negara mengingat keterlibatan perempuan di ranah publik berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan keluarga yaitu terpenuhinya kebutuhan dalam keluarga, beban suami sebagai pencari nafkah dalam keluarga menjadi lebih ringan, dan bertambahnya penghasilan keluarga. Para kaum perempuan yang tergabung dalam kelompok perempuan pemanfaat Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan menyadari akan pentingnya peranan perempuan dalam pembangunan sehingga tidak ada kendala bagi perempuan untuk bekerja di ranah publik. Meskipun demikian dalam prakteknya program ini tidak selalu berjalan mulus dalam setiap kegiatan dari suatu program, terlebih lagi yang berhubungan dengan uang. Dalam praktiknya, SPP PNPM-MP banyak mengalami hambatan dan kendala dalam hal pengembalian uang dari para nasabah atau peminjam antara lain :

(1) Pengembalian yang tidak tepat waktu atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam musyawarah, (2) Nasabah tidak mau membayar atau karena belum ada uang.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang PNPM-MP terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat pengembalian modal pinjaman dana SPP PNPM-MP Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu?
2. Faktor apa saja yang berhubungan dengan tingkat pengembalian modal pinjaman dana SPP PNPM-MP Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan SPP PNPM-MP Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu?

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat pengembalian modal pinjaman dana SPP PNPM-MP Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.
2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pengembalian modal pinjaman dana SPP PNPM-MP Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan SPP PNPM-MP Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan pertimbangan bagi Pemerintah daerah maupun pusat dalam penyelenggaraan program PNPM-MP terutama dalam kegiatan pengelolaan dana bergulir SPP selanjutnya.
2. Salah satu sumbanagan saran atau informasi bagi para pengurus SPP PNPM-MP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Bahan informasi bagi penelitian sejenis.